

SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DI KECAMATAN
NANGGALO KOTA PADANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

GITA KHAIRUN NISA

1610112103

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Pembimbing ;

Dr. Khairani, S.H., M.H

Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG

(Gita Khairun Nisa, 1610112103, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 122 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Salah satu usaha yang sedang marak berkembang adalah usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) sesuai dengan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah, usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) ini termasuk salah satu bentuk usaha mikro yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dampak dari usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) ini adalah limbah cucian pakaian yang menyebabkan harus adanya peran pemerintah dalam menangani hal tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun lingkungan. Bentuk peran pemerintah tersebut adalah dengan adanya pemberian izin yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sehingga nantinya usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat dan gangguan terhadap lingkungan. Sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha mikro di Kota Padang. *Kedua*, Bagaimana kendala izin usaha mikro yang terkait dengan usaha jasa pencucian pakaian (*laundry*) di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu menggambarkan kebijakan pemerintahan yang dikaitkan dengan pemberian izin usaha mikro. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung turun kelapangan dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku serta penerapannya. Pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kota Padang sebelumnya diberikan oleh Camat namun sejak tahun 2018 pelayanan pemberian izin usaha mikro dan kecil diberikan melalui Lembaga OSS secara online. Adapun kendala yang menjadi penghalang dalam pemberian izin adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya wawasan masyarakat dan tidak adanya sanksi. Untuk itu diharapkan agar pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas kepada pelaku usaha mengenai tata cara mengurus izin usaha mikro serta diharapkan agar pemerintah menetapkan sanksi yang jelas bagi para pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin.

Kata Kunci : *Pemberian izin, Usaha Mikro, Usaha Jasa pencucian pakaian (laundry).*